**ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN PADA UPT PUSKESMAS
BILOKKA KEC. PANCA LAUTANG****ANALYSIS OF RECOGNITION OF INCOME AND EXPENSES AT UPT PUSKESMAS
BILOKKA KEC. PANCA LAUTANG**

¹ Rahmawati, ²Amrizal Salida, ³Ari Ayu.

¹ Universitas Ichsan Sidenreng Rappang/ email: rtaehyung1@gmail.com

² Universitas Ichsan Sidenreng Rappang/ email: amrizal.salida10@gmail.com

³ Universitas Ichsan Sidenreng Rappang/ email: ariayulennarii@gmail.com

Penulis Korespondensi: E-mail: rtaehyung1@gmail.com

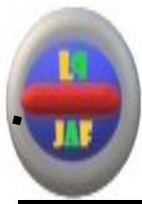
Abstract

The phenomenon that occurs in this research is that in recognizing income, the payment portion using BPJS still uses the cash basis method in recognizing it, while the PSAP regulations require agencies to use the accrual basis method in preparing financial reports. The aim and objective of this research is to analyze the recognition of income and expenses at UPT. Bilokka District Health Center. Panca Lautang. The benefits of this research are that it is hoped that it will provide benefits for the author, for UPT. Bilokka District Health Center. Panca Lautang, and for Institutions. The type of research used in this research is qualitative research using a narrative approach. This research was conducted at JL. Poros Soppeng, Bilokka sub-district, Panca Lautang sub-district. The data used are primary and secondary data. The techniques used in collecting data are observation, interviews and documentation techniques. The data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity tests used are source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. From the results of the research carried out in this thesis, it was found that the method used by UPT. Bilokka Community Health Center is not right. This is because the method used to recognize income still uses cash basis recognition, unlike expense recognition which is recognized using accrual basis recognition.

Keywords: *Recognition of Income and Expenses, Accrual Basis and Cash Basis, PSAP.*

Abstrak

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu dalam mengakui pendapatan bagian pembayaran menggunakan BPJS masih menggunakan metode kas basis dalam mengakuinya, sedangkan aturan pada PSAP mewajibkan instansi menggunakan metode akrual basis dalam menyusun laporan keuangan. Maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakuan pendapatan dan beban pada UPT. Puskesmas Bilokka Kec. Panca Lautang. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi UPT. Puskesmas Bilokka Kec. Panca Lautang, dan Bagi Institusi. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan naratif. Penelitian ini



dilakukan di JL. Poros Soppeng, kelurahan Bilokka kecamatan Panca Lautang. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini memperoleh hasil bahwa metode yang digunakan UPT. Puskesmas Bilokka belum tepat. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan dalam mengakui pendapatan masih menggunakan pengakuan kas basis tidak seperti pengakuan beban yang diakui menggunakan pengakuan akrual basis.

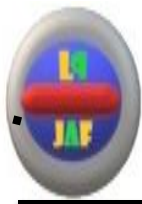
Kata Kunci: Pengakuan Pendapatan dan Beban, Akrual Basis dan Kas Basis, PSAP.

PENDAHULUAN

Ada beberapa jenis sistem pelayanan kesehatan pemerintah di Indonesia, termasuk rumah sakit, klinik, apotek, toko optic, fasilitas pelayanan kesehatan untuk tujuan hukum, dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Di Indonesia, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit khusus dan rumah sakit umum. Rumah sakit khusus bertugas memberikan pelayanan prioritas pada suatu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, kelompok umur, organ, atau jenis penyakit, termasuk rumah sakit khusus ibu dan anak, rumah sakit jantung, dan rumah sakit khusus kanker. Selain itu, rumah sakit juga dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan fungsi pelayanannya. Pada saat yang sama, rumah sakit umum berperan memberikan pelayanan kesehatan terhadap segala penyakit dan penyakit (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Sumber dana puskesmas atau layanan kesehatan pemerintah berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran pendapatan Belanja Daerah). Dalam pengelolaan anggaran tersebut diperlukan adanya laporan keuangan untuk mengetahui keberlangsungan kegiatan operasional layanan kesehatan.

Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan hasil suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan atau kegiatan lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan berperan sebagai pembawa informasi yang menghubungkan lembaga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan menunjukkan status keuangan lembaga serta operasional lembaga tersebut (Hery, 2016). Menurut Novelita dkk (2019), laporan



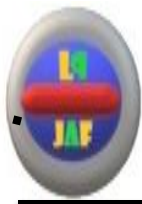
keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk laporan dari perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang dan pemerintah. Bisnis yang menawarkan dan menjual jasa dikenal sebagai perusahaan jasa, mereka yang mempedagangkan barang atau produk tanpa mengubahnya dikenal sebagai perusahaan dagang, dan bisnis yang memproduksi barang dan menjualnya sebagai produk baru dikenal sebagai perusahaan manufaktur. Perusahaan yang berada dibawah naungan pemerintah merupakan perusahaan yang memiliki peran dalam memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan ekonomi negara (Fernanda 2019). Puskesmas merupakan salah satu bagian dari unit pemerintahan daerah yang berperan dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat serta diharapkan mampu meningkatkan ekonomi negara.

Puskesmas merupakan bagian dari unit pemerintahan daerah yang bergerak dalam layanan kesehatan masyarakat. Dimana unit pemerintahan daerah merupakan bagian dari SKPD. Sebagaimana tertuang dalam (Kementerian Kesehatan RI. 2021) bahwa, daerah otonom tingkat kabupaten/kota, sebagai pemilik puskesmas, dan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah sewajarnya bersifat akuntabel, untuk menunjang aktivitas masyarakat. Puskesmas meningkatkan standar pelayanan kesehatan primer, SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) berfungsi sebagai bendahara umum daerah dan merupakan lembaga yang menghubungkan keduanya dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepala daerah, SKPD dan SKPKD mempunyai hubungan yang setara secara kelembagaan. Bendahara dan ketua UPTD merupakan dua orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan satuan kerja pemerintah daerah.

Sumber pendapatan puskesmas diperoleh dari pendapatan pengobatan rawat jalan, pendapatan pengobatan institusi, pendapatan pengobatan dan pendapatan lain-lain, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Puskesmas juga mengeluarkan biaya berupa biaya pelayanan dan biaya administrasi umum. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban yaitu *cash basis* dan *accrual basis*. Sebagaimana dijelaskan oleh (Kementerian Kesehatan RI; 2014), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pembiayaan bagi Puskesmas.

Menentukan kapan pendapatan diakui sebagai pendapatan dan beban merupakan tujuan utama pengakuan pendapatan dan beban. Basis akrual dan basis kas



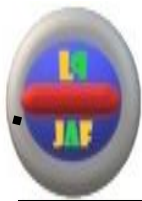
digunakan dalam proses pengakuan. Bila menggunakan basis kas, pengeluaran dicatat pada saat kas dilaporkan dan pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam penerapan metode akrual, pendapatan dicatat segera setelah dihasilkan walaupun uang belum diterima, dan beban dicatat segera setelah terjadi tanpa memperhatikan arus kas keluar perusahaan (Wardoyo dkk, 2021).

Metode dalam mengakui pendapatan dan beban merupakan unsur penting dalam laporan keuangan. Dimana instansi perlu memperhatikan metode pengakuan pendapatan dan beban seperti apa yang harus diterapkan karena metode tersebut dapat mengakibatkan ketidaksesuaian pada hasil laba. Jadi, hal tersebut perlu dianalisis mengenai metode pengakuan mana yang harus diterapkan.

Salah satu instansi yang metode pengakuannya perlu diberikan perhatian yaitu instansi milik pemerintah. Diantaranya yaitu Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat). Puskesmas merupakan unit pemerintah daerah yang disediakan pada setiap kecamatan. Salah satunya yaitu puskesmas yang berada pada kecamatan panca lautang yaitu UPT Puskesmas Bilokka.

Puskesmas Bilokka merupakan instansi milik pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dimana pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan yang dilaksanakan melalui Unit Gawat Darurat (UGD), rawat inap serta rawat jalan. UPT Puskesmas Bilokka telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ditujukan pada masyarakat sekitar melalui peningkatan fasilitas dan sarana prasarana dengan menggunakan teknologi terbaru serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat serta karyawan puskesmas bilokka. Dari pelayanan tersebut yang diberikan akan menghasilkan pendapatan bagi puskesmas. Pada Puskesmas Bilokka transaksi yang dilakukan oleh para pasien dalam pembayaran tagihan dilakukan dengan cara pembayaran melalui BPJS, dan pembayaran secara umum atau tunai. Untuk memberikan informasi keuangan mengenai pendapatan dan beban diperlukan adanya metode pengakuan pendapatan dan beban tersebut.

Fenomena dalam penelitian, dimana puskesmas merupakan unit milik pemerintah yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pada pencatatan laporan keuangan (pengakuan pendapatan dan bebannya) diatur dalam PSAP. Menurut Pasal 1(3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Negara (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian rekening tahunan Negara. Kantor Wilayah Administrasi Daerah (BLUD) merupakan salah satu jenis sistem akuntansi yang menerapkan SAP berbasis akrual untuk mencatat pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan operasional. Penerapan akuntansi berbasis akrual di dewan dapat dilakukan secara



bertahap, mulai dari pengenalan SAP berbasis kas hingga penerapan SAP berbasis akrual, karena pada tahun 2015 penerapan akuntansi berbasis akrual bersifat wajib. SAP merupakan prinsip yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Moenek dkk, 2020). Pada PSAP menyatakan bahwa sistem pencatatan laporan keuangan (pengakuan pendapatan dan beban) bagi pemerintahan menggunakan akrual basis, tetapi terkadang beberapa transaksi menggunakan kas basis. Seperti halnya pada hasil observasi dimana metode pembayaran yang digunakan melalui non-BPJS menggunakan pencatatan transaksi secara kas basis.

Pihak UPT. Puskesmas Bilokka perlu mengetahui metode pelaporan pendapatan dan pengeluaran mana yang sebaiknya digunakan, karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan hasil, dimana informasi yang disajikan dalam laporan tidak masuk akal dan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam meneliti sebuah instansi diperlukan dokumen terbaru. Oleh karena itu, peneliti menganalisis laporan keuangan periode 2021-2022.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berpendapat bahwa masalah pengakuan pendapatan dan beban perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada UPT Puskesmas Bilokka Kec. Panca lautang”**

METODE PENELITIAN

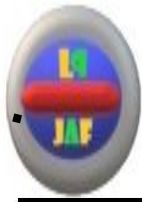
Peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti hanya ingin melihat bagaimana pengakuan pendapatan dan beban pada Puskesmas Bilokka tanpa melakukan perhitungan statistika. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Puskesmas Bilokka yang akan diteliti khususnya pada metode pengakuan pendapatan dan beban melalui laporan operasional apakah menggunakan akrual basis atau kas basis.

A. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan tahapan pengolahan data. Data yang terkumpul akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian (Bahri, 2018). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan data yang berlebihan, dan mengorganisasikan data sehingga pada akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi



kesimpulannya. Melalui reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan dimodifikasi dengan berbagai cara melalui seleksi yang ketat.

Penyajian Data (Data Display)

Ada 9 (sembilan) model penyajian data menurut Miles dan Huberman (Muhadjir, 2010) dalam hardani (2020) yaitu:

- Untuk Mendeskripsikan data penelitian, misalnya dalam bentuk bagan organisasi, peta geografis, dan lain-lain;
- Model yang digunakan untuk melacak komponen atau dimensi penelitian disebut matriks kendali.
- Model yang menggambarkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- Model keempat ini berbentuk matriks struktur peran, yang menggambarkan pendapat, sikap, keterampilan atau aspek lain dari berbagai aktor, seperti siswa, guru, dan kepala sekolah.
- Model kelima adalah matriks konsep berkerumun.
- Model keenam adalah matriks efek atau efek.
- Model ketujuh adalah matriks dinamis lokal.
- Pola kedelapan adalah pembuatan daftar kejadian.
- Model sembilan adalah jaringan kalimat untuk beberapa peristiwa yang dipelajari.

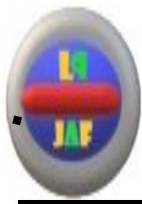
Peneliti menggunakan analisis data display karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Selaras dengan Hardani (2020), dengan mendisplaykan data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang dipahami.

Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Peneliti menggunakan simpulan dan verifikasi karna dapat menjawab rumusan masalah peneliti. Seperti hal-nya yang dikemukakan Hardani (2020) dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif bisa sesuai atau tidak sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena sebagaimana dikemukakan, permasalahan dan rumusan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang selama peneliti berada di lapangan.

Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data adalah suatu teknik dimana data dari berbagai



sumber diverifikasi dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda (Miawaty, 2021). Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi karena informasi yang diperoleh lebih dapat dipercaya. (Hardani, 2020) Nilai dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh bersifat konvergen (digeneralisasi), tidak konsisten atau bertentangan. Oleh karena itu, apabila pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, informasi yang diperoleh lebih konsisten, lengkap dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

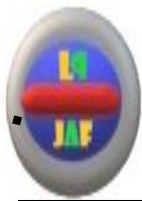
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kedua informan atas nama Ambo Upe menjabat sebagai bendahara pengeluaran, dan Hj. Sri Nursam menjabat sebagai bendahara pemasukan.

Sesuai dengan aturan tersebut puskesmas bilokka yang merupakan salah satu instansi yang ada di kabupaten sidenreng rapping yang bergerak dalam bidang kesehatan seharusnya juga mengikuti regulasi berdasarkan peraturan pemerintah diatas.

Namun berdasarkan hasil wawancara UPT. Puskesmas Bilokka nyatanya tidak sepenuhnya menjalankan regulasi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan atas nama Ambo Upe yang merupakan bendahara pengeluaran pada UPT. Puskesmas Bilokka, dimana ketika peneliti menanyai tentang "Bagaimana cara mengakui pendapatan dan bebannya apakah menggunakan kas basis atau akrual basis dalam pencatatan dalam menyusun laporan keuangannya" beliau menjawab sebagai berikut:

"Baik untuk pengakuan pendapatan itu kami masih menggunakan kas basis yah sesuai dengan uang yang masuk direkening puskesmas".

"jadi khusus pendapatan itu kami akui secara kas basis, ehm pertama untuk yang dana yang masuk di rekening kas daerah itu kami hanya mengetahui pelaporannya dari bendahara penerimaan dinas. kemudian untuk kapitasi itu kami akui juga yang masuk ke rekening kami sesuai dengan yang ditransfer dari BPJS begitupun dengan BOK. Jadi dalam hal ini, kami juga sebenarnya mengalami keterbatasan karna kami bukan tenaga akuntansi jadi basic kami itu sarjana kesehatan semua yang dipekerjakan di puskesmas. Mungkin itu tidak sesuai



dengan apa tadi, PASP nya yah dari kabupaten, jadi mungkin kedepannya akan kami perbaiki".

Pengakuan pendapatan diakui menggunakan metode pengakuan kas basis dalam artian pendapatan akan diakui apabila uang sudah masuk di dalam rekening.

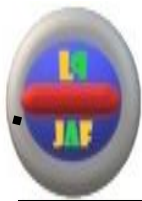
Pernyataan dari informan atas nama Ambo Upe juga didukung dan sesuai dengan pernyataan informan atas nama Ibu Hj. Sri Nursam ketika ditanyakan hal yang sama, beliau menyatakan bahwa:

"Pada bagian pendapatan diakui secara kas basis dimana pendapatan akan diakui saat uang sudah masuk di rekening puskesmas".

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut dapat dilihat bahwa UPT. Puskesmas Bilokka belum sepenuhnya mengikuti regulasi yang ada. Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor seperti pihak UPT. Puskesmas Bilokka mengenai pelaporan dana yang masuk pada rekening kas daerah itu diketahui melalui penerimaan dinas (artinya, pihak puskesmas hanya menerima pelaporannya). Selanjutnya, juga dikarenakan rata-rata staf keuangan yang dipekerjakan pada puskesmas merupakan pekerja yang berlatar belakang sebagai petugas kesehatan yang juga bertugas pada pelayanan kesehatan sehingga mereka kurang memahami mengenai masalah keuangan khususnya regulasi tentang pengakuan pendapatan yang harus berbasis akrual. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada beberapa pernyataan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Puskesmas Bilokka dalam mencatat pengakuan pendapatannya masih menggunakan metode pengakuan secara kas basis, hal tersebut bertentangan dengan peraturan standar akuntansi pemerintah (PSAP) pasal 1 ayat (8) PP 71 Tahun 2010 yang mewajibkan puskesmas untuk mencatat menggunakan metode pengakuan berbasis akrual dalam mengakui pendapa Dalam laporan keuangan operasional Puskesmas Bilokka tahun 2021-2022 terdapat 2 (Dua) akun pada Pendapatan Asli Daerah:

1. Pendapatan retribusi daerah yang mana saldo pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.058.553.925.00, dan saldo pada tahun 2022 sebsar Rp. 967.559.675.00 yang terdiri dari 3 pos akun yaitu:
 - 1) Retribusi pelayanan kesehatan kapitasi puskesmas bilokka
 - 2) Retribusi pelayanan kesehatan klaim puskesmas bilokka
 - 3) Retribusi pelayanan kesehatan pelayanan umum puskesmas bilokka



2. Lain-lain PAD yang sah, saldo pada tahun 2021 sebesar Rp. 555.247.925.00, dan saldo pada tahun 2022 sebesar Rp. 652.715.000.00 yang terdiri dari dua pos akun yaitu:

- 1) BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
- 2) Piutang

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa UPT. Puskesmas Bilokka memiliki dua akun pendapatan yang pertama adalah pendapatan retribusi daerah dan yang kedua yaitu pendapatan asli daerah lain-lain. Dimana pendapatan ini diakui menggunakan metode kas basis artinya pendapatan diakui apabila terdapat aliran uang masuk.

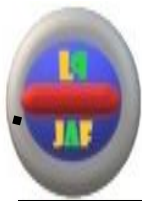
Sedangkan regulasi menyatakan bahwa pendapatan diakui meskipun belum ada aliran uang masuk. Ketidaksihesuaian pengakuan pendapatan dalam UPT. Puskesmas Bilokka sesuai dengan temuan sebelumnya dimana pegawai yang bertanggung jawab pada bagian keuangan memiliki latar belakang yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Hasil ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penelitian. Dimana peneliti saat mewawancarai informan yang sama yaitu Ambo Upe dan Hj. Sri Nursam ketika ditanya mengenai, "bagaimana proses pencatatan dalam mengakui pendapatan retribusi daerah dan PAD lain-lain yang tertera pada laporan operasional apakah menggunakan metode pengakuan akrual basis atau kas basis".tannya pada laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan lain-lain dicatat menggunakan pengakuan berbasis kas yang meliputi Pendapatan BOK, dan Piutang. Dimana pendapatan BOK diakui secara kas basis dalam artian pendapatan tersebut dicatat apabila uang atau kas sudah diterima. Untuk piutang juga diakui menggunakan kas basis dimana piutang tersebut meliputi penghasilan melalui pembayaran BPJS yang mana hal tersebut akan diakui sebagai piutang terlebih dahulu, piutang tersebut akan diakui sebagai pendapatan apabila pihak BPJS telah membayar atau mentransfer penghasilan yang diperoleh pihak puskesmas melalui pembayaran BPJS yang digunakan oleh pasien.

Pada pernyataan kedua informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengakuan pendapatan pada puskesmas bilokka menggunakan metode kas basis dimana pengakuan terjadi apabila uang atau kas sudah diterima yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan kapitasi, pelayanan kesehatan klaim, pelayanan kesehatan umum, dan pendapatan lain-lain yang meliputi BOK dan piutang.

Hasil wawancara tersebut memperoleh hasil bahwa UPT. Puskesmas Bilokka dalam mengakui pendapatannya menggunakan metode pengakuan kas basis,



dimana metode yang digunakan tersebut berbeda dengan regulasi yang menyatakan bahwa metode yang wajib digunakan yaitu metode pengakuan akrual basis. pernyataan informan sebelumnya menyatakan alasan belum bisa menyesuaikan metode yang digunakan dengan regulasi dikarenakan adanya keterbatasan bahwa rata-rata pegawai yang bekerja di bagian keuangan merupakan pegawai yang berlatar belakang pendidikan kesehatan.

Sedangkan untuk pencatatan pengakuan beban pada UPT. Puskesmas Bilokka dalam melakukan pengakuan telah sesuai dengan regulasi yang dijelaskan pada PP 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dalam pasal 1 ayat 8 yang menyebutkan inti dari peraturan ini yang mengatakan bahwa pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas, belanja, dan pembiayaan harus dilaporkan dalam laporan keuangan secara akrual basis dimana transaksi diakui walaupun belum ada aliran uang keluar.

Pada UPT. Puskesmas Bilokka, peneliti menemukan bahwa UPT. Puskesmas Bilokka sudah menjalankan regulasi tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari informan atas nama Ambo Upe dan Hj. Sri Nursam yang apabila ditanyakan mengenai. "bagaimana pihak UPT. Puskesmas Bilokka dalam mengakui bebannya apakah menggunakan akrual basis atau kas basis". beliau menyatakan bahwa:

"Jadi untuk pengakuan beban itu kami menggunakan basis akrual yah karna yang disini itu hanya pendapatan dengan mbla yang berbasis kas".

Pengakuan beban menggunakan pengakuan basis akrual, yang menggunakan kas basis hanya pendapatan dan mbla (PAD lain-lain yaitu piutang dan BOK).

Pernyataan dari informan atas nama Ambo Upe juga didukung dan sesuai dengan pernyataan informan atas nama Ibu Hj. Sri Nursam ketika ditanyakan hal yang sama, beliau menyatakan bahwa:

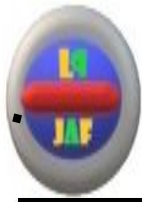
"Untuk beban itu kami menggunakan pengakuan secara akrual basis".

Pada beban menggunakan metode pengakuan akrual basis.

Pada pernyataan diatas menjelaskan bahwa UPT Puskesmas Bilokka dalam melakukan pencatatan pengakuan beban menggunakan metode pengakuan berbasis akrual yang terdiri (empat) akun beban pada tahun 2022, dan 5 (lima) akun beban pada tahun 2021 yaitu:

Beban Operasi dalam laporan keuangan tahun 2021 sebesar Rp. 1.664.243.746.00, pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.806.054.112.00 yang terdiri dari:

1. Beban Persediaan, saldo pada tahun 2021 sebesar Rp. 183.320.775.00, pada tahun 2022 sebesar Rp. 185.647,725,00 yang terdiri dari 8 (delapan) pos akun yaitu: 1) Barang pakai habis, 2) Hutang beban BBM, 3) Hutang beban alat listrik, 4) Hutang



- beban alat pembersih, 5) Hutang beban ATK, 6) Hutang beban cetak (foto copy), 7) Ekstrakonventabel, 8) Persediaan
2. Beban jasa, saldo pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.171.169.538.00, pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.523.169.867.00 yang terdiri dari 6 (enam) pos akun yaitu: 1) Jasa kantor, 2) Utang kapitasi 2020, 3) Utang kapitasi 2022, 4) Utang klaim 2022, 5) Utang beban pelayanan umum 2022, 6) Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga
 3. Beban perjalanan dinas, saldo pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.676.000.00, pada tahun 2022 sebesar Rp. 72.933.120.00
 4. Beban Pemeliharaan, saldo pada tahun 2021 sebesar Rp. 12.157.288.00, pada tahun 2022 sebesar Rp. 24.303.400.00 terdiri dari 1 (satu) pos akun tahun 2021, 2 (dua) pos akun tahun 2022 yaitu: 1) Beban pemeliharaan 2021-2022, 2) Hutang beban pemeliharaan alat pendingin 2022, 3) Hutang beban belanja suku cadangan alat angkutan 2022
 5. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 sebesar Rp. 285.931.321.00 yang terdiri dari 3 (tiga) pos akun yaitu: 1) Peralatan dan mesin, 2) Gedung dan bangunan, 3) Jalan, Jaringan dan irigasi.

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat dimaknai bahwa pihak UPT. Puskesmas Bilokka menggunakan pencatatan pengakuan berbasis akrual dalam mengakui Beban-beban nya, hal tersebut telah sesuai dengan PSAP yang berlaku yang mewajibkan puskesmas menggunakan pencatatan metode pengakuan berbasis akrual dalam mengakui Beban-beban nya pada penyajian laporan keuangan.

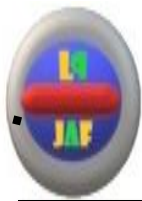
Pihak UPT. Puskesmas Bilokka dalam mengakui beban-bebannya telah mengikuti sesuai dengan regulasi yaitu menggunakan metode pengakuan berbasis akrual. Hal ini telah dinyatakan oleh informan sebelumnya menyatakan bahwa beban-beban diakui pada saat transaksi terjadi walaupun bendahara belum melakukan pengeluaran terhadap transaksi tersebut.

Pembahasan

UPT. Puskesmas Bilokka menggunakan kedua metode dalam pengakuan yaitu pengakuan secara kas basis dan pengakuan secara akrual basis, berikut adalah pembahasan yang lebih lengkap mengenai pengakuan yang digunakan oleh pihak yang diteliti dalam mengakui pendapatan dan bebannya.

Basis Akuntansi Yang Diterapkan Pada UPT. Puskesmas Bilokka

Penggunaan metode dalam melakukan pencatatan pengakuan pendapatan dan beban pada sebuah Puskesmas telah dijelaskan pada PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 yang mana inti dari



penjelasan tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan pengakuan pendapatan dan beban pada sebuah instansi milik pemerintah diharuskan menggunakan metode pengakuan secara akrual basis dalam mengakui pendapatan dan beban pada laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil wawancara beserta dokumen pendukung lainnya, peneliti dapat menyatakan bahwa basis yang digunakan dalam melakukan pencatatan pengakuan pendapatan dan beban pada UPT. Puskesmas Bilokka yaitu menggunakan akrual basis dan kas basis. Pencatatan pengakuan pendapatan menggunakan metode kas basis dimana pendapatan diakui sebagai pendapatan saat uang atau kas sudah diterima, sedangkan pencatatan pengakuan beban yang digunakan yaitu metode pengakuan akrual basis dimana beban diakui pada saat transaksi terjadi meskipun uang atau kas belum diterima secara fisik maupun non-fisik.

KESIMPULAN

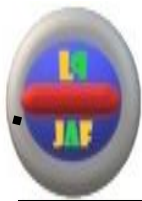
Dilihat dari isi pembahasan dalam skripsi ini dapat disimpulkan Puskesmas Bilokka menggunakan dua metode dalam mengakui pendapatan dan bebannya yaitu:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Puskesmas Bilokka menggunakan metode pengakuan berbasis kas dalam mengakui pendapatannya yang meliputi Pendapatan retribusi daerah yang meliputi pendapatan pelayanan kesehatan kapitasi, pendapatan pelayanan kesehatan klaim, dan pendapatan pelayanan kesehatan jasa umum. Serta pendapatan lain-lain yang meliputi pendapatan BOK, dan piutang.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Puskesmas Bilokka menggunakan metode pengakuan berbasis akrual dalam mengakui Beban-bebannya yang meliputi beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban penyusutan dan amortisasi.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran yang terdiri 2 (dua) saran yaitu saran secara praktis yang khususnya untuk UPT. Puskesmas Bilokka dan saran secara teoritis khusus untuk peneliti selanjutnya.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak Puskesmas Bilokka agar lebih optimal dalam menyusun laporan keuangan terutama dalam pencatatan pengakuan pendapatan dan beban agar sesuai

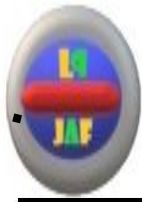


dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu akuntansi tentang analisis laporan keuangan khususnya pada pengakuan pendapatan dan beban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis - Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), CV. Andi Offset.
- Bastian, Indra. 2020. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. Buku 2: Penerbit Salemba Empat, PT Salemba Emban Patria, Grand Wijaya Center Blok D-7.
- Dendo, Dedi Kristian. 2021. Ketersesuaian Kartu Stok dan Jumlah Fisik Obat Antibiotik di Puskesmas Mojolongo Kota Malang. Tesis Diploma, Malang: Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang.
- Dewianawati, Dwi. 2022. Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Laporan Keuangan pada KPPRI. Riset dan Jurnal Akuntansi Vol.6 No.1 Januari 2022, e - ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507.
- Fernanda, Muhammad. 2020. Laporan Sistem Akuntansi dan Pengendalian Aplikasi Zahir Pembelian Impor pada PT.Xyz. Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Hardani, 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Hery, 2016. Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition, Cetakan 1, Jakarta: PT Gramedia
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Profil Kesehatan Indonesia 2018 (PDF). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemntrian Kesehatan RI. 2021. Pembinaan Terpadu Puskesmas oleh Dinas Kesehatan di Puskesmas. Jakarta : Kemntrian Kesehatan RI.
- Machfoedz, Mas'ud. 2020. Akuntansi Keuangan Menengah. Buku 1, Edisi kedua: BPFE-YOGYAKARTA.
- Miawaty, Feni. 2021. Mengungkap Dampak Covid-19 pada UMKM Sektor Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun). Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta



- Moenek, R., Suwanda, D., & Rachmat, B. 2020. DasarDasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. PT. Remaja Rosdakarya.
- Novelita, L.L., & NoermanSyah, A.L., & Amaliyah, F. 2019. Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Pt Citra CahaYa Anura Tegal.
- Sinaga, Renghard. 2018. Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga. Skripsi. University HKBP Nommensen.
- Wardoyo, D.U, Septiani, A.D, Baroroh, Nur, 2021. Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT Telekomunikasi. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.1, No.1, Desember 2021